



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BENGKULU
DENGAN
IKATAN DA'I INDONESIA KOTA BENGKULU**

**TENTANG
PEMBINAAN ROHANI (PENYULUHAN & BIMBINGAN)
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB BENGKULU**

Nomor : W8.PAS.PAS10.PK.01.05.09-305

Nomor : 051/Humas Ikadi/VII/2021

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **YEKTI APRIYANTI** : Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu, berkedudukan dan beralamat di Jalan W.R. Supratman RT/RW 020/001 Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **ADI SUCIPTO** : Selaku Ketua Ikatan Da'i Indonesia Kota Bengkulu, berkedudukan dan beralamat di Jalan MT. Haryono Kampung Bali Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Da'i Indonesia Kota Bengkulu untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama di sebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan

Rohani (Penyuluhan dan Bimbingan) bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu.

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

- a. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu selanjutnya di sebut Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu adalah tempat untuk melaksanakan penyuluhan dan bimbingan agama (pembinaan kerohanian) untuk Warga Binaan Pemasyarakatan.
- b. Ikatan Da'i Indonesia selanjutnya di sebut IKADI adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat ke-Islam-an yang diwujudkan dalam bentuk ukhuwah dan silaturahim dalam membina dan mengembangkan ta'aruf, ta'awun, dan tausiat di jalan kebenaran guna memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa serta mengangkat harkat dan martabat umat manusia.
- c. Dakwah merupakan usaha menemukan dan menyampaikan kepada Masyarakat seluruh umat tentang pandangan dan tujuan hidup manusia di dunia yang meliputi amar ma'ruf nahi munkar, sedangkan secara terminologis dakwah adalah mengajak atau menyeru manusia agar menempuh kehidupan ini di jalan Allah swt berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadits.
- d. Warga Binaan Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat WBP adalah Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan.
- e. Pembinaan rohani merupakan usaha untuk bina iman dan taqwa atau pemecahan masalah bersama melalui penyuluhan dan bimbingan kepribadian.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud dan tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk memberikan penyuluhan dan bimbingan kerohanian bagi WBP Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu.
- 2) Memberikan bekal ilmu agama atau motivasi diri sekaligus menyadarkan atas kesalahan yang telah diperbuat sehingga nanti dapat melaksanakan fungsi sosial secara optimal di dalam hidup bermasyarakat setelah menjalani pidana di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pembinaan rohani, penyuluhan dan bimbingan kepribadian untuk seluruh WBP Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan bimbingan kepribadian hanya dilakukan di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN (TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB)

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berhak :

- a. Menyaring dan menolak materi yang akan disampaikan (tidak mengandung paham radikal dan paham terlarang).
- b. Mengubah dan mengatur ulang jadwal pelaksanaan kegiatan pembinaan kerohanian dikarenakan alasan tertentu (gangguan keamanan, bencana alam dan kegiatan acara kantor yang tidak dapat di tunda).
- c. Mengusulkan dan mengajukan permintaan tenaga Ustadz/ Penyuluhan Agama PIHAK PERTAMA berkewajiban:
 - a. Menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan pembinaan kerohanian di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu.
 - b. Menyiapkan sasaran (objek binaan).
 - c. Menjamin keamanan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kerohanian.
 - d. Menyiapkan dukungan administrasi untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup.
 - e. Menyediakan sarana dan prasarana untuk PIHAK KEDUA.
 - f. Melakukan penguatan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan bersama PIHAK KEDUA.

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

PIHAK KEDUA berhak :

- a. Memperoleh jaminan keamanan.
- b. Memperoleh fasilitas dan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kerohanian di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu.

PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Menyiapkan Tenaga Ustadz/Penyuluhan Agama.
- b. Menyiapkan materi, bahan, dan hal - hal yang mendukung proses pembinaan (penyuluhan).
- c. Mematuhi tata tertib di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu.
- c. Melakukan penguatan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan bersama Pihak Pertama.

Pasal 6 **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kerohanian dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 7 **MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 8 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan kesepakatan bersama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak.

Pasal 9 **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan bersama.

2. Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana di maksud dalam ayat (2), dengan ketentuan Pihak yang dimaksud mengakhiri nota Perjanjian Kerja Sama (PKS) wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

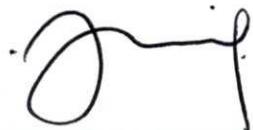
Pasal 10
LAIN – LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan PARA PIHAK dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



YEKTI APRIYANTI

PIHAK KEDUA



ADI SUCIPTO